



Peran Dinas Koperasi dan Umkm dalam Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah

Rahmat Haekal Putra¹, Nur Sanjaya², Riyandhi Praza³, Nanda Ameliyany⁴, Lisa Iryani⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Malikussaleh

E-mail: rahmathaikal1143@gmail.com

Article Info

Article history:

Received August 10, 2025

Revised August 16, 2025

Accepted August 25, 2025

Keywords:

UMKM, Pengembangan

UMKM, Pemberdayaan

UMKM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Studi ini mengkaji bagaimana Peran dari Dinas Koperasi dan UMKM berfungsi sebagai lembaga penghubung antara pemerintah dan pelaku UMKM, serta strategi-strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM yang berbasis pelatihan untuk menunjang kemajuan dan produktivitas dari UMKM di Kabupaten Aceh Tengah. Metodologi penelitian melibatkan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara Data dikumpulkan dari pegawai Dinas Koperasi dan UMKM yang menaungi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah sangat bergantung pada peran aktif dan sinergi antara Dinas Koperasi dan UMKM serta partisipasi pelaku UMKM itu sendiri. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program meliputi peningkatan alokasi dana, penguatan jaringan kerja sama, dan perbaikan infrastruktur yang mendukung UMKM.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received August 10, 2025

Revised August 16, 2025

Accepted August 25, 2025

Keywords:

SMEs, SME Development, SME

Empowerment

ABSTRACT

This study aims to explore the role of the Cooperative and SMEs Office of Central Aceh Regency in the development and empowerment of SMEs in the region. It examines how the Office acts as an intermediary between the government and SME stakeholders, and the strategies it employs to enhance SME capacity and competitiveness through training-based programs. The research uses a qualitative approach, gathering data through interviews with staff from the Cooperative and SMEs Office who are involved in SME development and empowerment activities. The findings indicate that the success of SME development and empowerment in Central Aceh Regency depends significantly on the proactive role and collaboration between the Cooperative and SMEs Office and the engagement of SME practitioners. Recommendations for improving program effectiveness include increasing budget allocation, strengthening collaborative networks, and enhancing infrastructure to support SMEs.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rahmat Haekal Putra

Universitas Malikussaleh

E-mail: rahmathaikal1143@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan sebuah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan dan memperbaiki seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus menjadi proses dalam penyelenggaraan sistem kenegaraan secara menyeluruh. Pembangunan tersebut mencerminkan kehendak untuk terus mengupayakan kesejahteraan yang adil dan merata serta mengembangkan kehidupan yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang sangat penting karena mampu memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran UMKM juga dinilai strategis karena mampu berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional dan dalam praktiknya telah terbukti memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pergerakan perekonomian Indonesia (Pujiono, 2020). Oleh sebab itu, pengembangan UMKM menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius dan dukungan berkelanjutan agar dapat terus berkembang dan menopang kehidupan ekonomi masyarakat.

UMKM tidak hanya sekadar menjadi penggerak utama dalam perekonomian lokal, melainkan juga mampu berfungsi sebagai sarana penciptaan kreativitas dan inovasi masyarakat. Selain memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi, UMKM juga menjadi wadah dalam memperkuat kebudayaan lokal di setiap daerah. Dalam skala lebih luas, UMKM berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran, termasuk bagi alumni perguruan tinggi yang belum terserap dalam dunia industri.

Peran ini semakin ditegaskan dengan adanya regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM. Regulasi tersebut mengamanatkan agar pemberdayaan UMKM dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan, baik melalui dukungan kebijakan, kesempatan berusaha, maupun penguatan kapasitas, sehingga UMKM dapat memiliki daya saing yang lebih baik serta kedudukan yang kuat dalam perekonomian nasional (Syaakir, 2017).

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM. Berbagai sektor usaha seperti pariwisata, kuliner, kopi, pertanian, peternakan, kerajinan tangan, hingga produk olahan makanan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah, jumlah UMKM mengalami peningkatan dari 1.109 unit pada tahun 2022 menjadi 1.882 unit pada tahun 2023.

Peningkatan signifikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan positif dalam berbagai



sektor ekonomi, yang tidak hanya mengandalkan potensi sumber daya alam seperti kopi dan hasil pertanian, tetapi juga pariwisata serta industri kreatif yang berkembang pesat (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah, 2023). Pertumbuhan tersebut merupakan hasil dari berbagai program pemerintah daerah yang mendorong pengembangan UMKM secara masif dan berkelanjutan, sehingga UMKM dapat menjadi tumpuan ekonomi lokal yang lebih kuat.

Dalam proses pengembangan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah memiliki peranan yang sangat penting. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 83 Tahun 2020, lembaga ini berfungsi untuk mendukung, mengawasi, serta mengembangkan sektor koperasi dan UMKM. Berbagai program yang dilaksanakan meliputi pendampingan dan penguatan kapasitas, pemberian bantuan pembiayaan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia, pelatihan keahlian, serta pembinaan berkelanjutan.

Program-program ini bertujuan untuk memperkuat daya saing UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Hasil dari implementasi program tersebut terlihat dari peningkatan jumlah UMKM serta kualitas usaha yang semakin berkembang, meskipun di sisi lain pelaku UMKM tetap menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses pasar, kesulitan modal, keterampilan bisnis yang belum memadai, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung.

Keberadaan UMKM di Aceh Tengah pada akhirnya tidak hanya menjadi penopang ekonomi lokal, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sekaligus menjadi sarana penting dalam mengurangi pengangguran dan menumbuhkan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM melalui peran aktif Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah serta memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nurdewi (2022), penelitian kualitatif merupakan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Pendekatan ini menggunakan data berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan peneliti sebagai instrumen utamanya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata serta tindakan, sedangkan dokumen, foto, dan bahan lainnya menjadi data pendukung. Secara umum, data terbagi menjadi dua yaitu data primer (lapangan) dan data sekunder (kepustakaan).

Hasil

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka didapati informasi bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah



Pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah difokuskan pada peningkatan kemandirian, daya saing, serta penguatan kelembagaan. Dinas Koperasi dan UMKM menjalankan berbagai program seperti pelatihan teknis dan nonteknis, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, serta kegiatan rutin yang mendorong antusiasme masyarakat. Hasil wawancara dengan informan kunci menunjukkan bahwa pelatihan mampu meningkatkan keterampilan pelaku UMKM, namun keterbatasan dana menjadi kendala utama. Untuk mengatasinya, dilakukan kolaborasi dengan lembaga lain agar program tetap berjalan. Faktor pendukung keberhasilan UMKM meliputi daya beli masyarakat, keberlanjutan pelatihan, dan sinergi antar pihak. Strategi yang diterapkan meliputi kemudahan perizinan, pendataan UMKM, pengembangan jaringan pemasaran, peningkatan kompetensi SDM, serta fasilitasi usaha mikro agar naik skala. Upaya ini tidak hanya memperkuat daya saing, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan melindungi usaha tradisional.

2) Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Pelatihan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan memberi dampak langsung bagi pelaku UMKM. Peserta mengaku memperoleh keterampilan baru, dapat memperbaiki kelemahan usaha, serta terdorong untuk mengembangkan usaha dan membuka lapangan kerja baru. Contohnya adalah pelaku usaha kopi menjadi lebih terampil mengolah produk, sedangkan peternak madu memperoleh pengetahuan teknis, bantuan alat, serta motivasi untuk memperluas usaha. Pelatihan ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas, penguatan daya saing, dan keberlanjutan UMKM di Aceh Tengah. Program tersebut sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, serta pengembangan ekonomi daerah.

3) Hambatan Kegiatan Pelatihan

Meskipun pelatihan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah memberi banyak dampak positif, tetap terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan utama yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM antara lain:

- i. Keterbatasan akses dan infrastruktur, khususnya bagi pelaku UMKM yang berada di daerah terpencil dengan fasilitas transportasi maupun sarana pelatihan yang terbatas.
- ii. Keterbatasan anggaran dan sumber daya, yang memengaruhi jumlah serta kualitas program pelatihan.
- iii. Keterbatasan kualitas tenaga pengajar, karena tidak semua instruktur memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, dinas melakukan langkah-langkah strategis seperti menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak (misalnya bank, balai latihan kerja, maupun lembaga terkait lainnya), menyesuaikan program dengan kebutuhan peserta, serta melaksanakan evaluasi dan umpan balik secara rutin. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu informan, Bapak Ramlan, yang menyebutkan bahwa kendala biaya kerap menjadi hambatan, namun dapat diatasi dengan cara mencari sponsor atau berkolaborasi dengan pihak lain. Dengan adanya upaya antisipasi ini, program pelatihan tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat yang optimal bagi pelaku UMKM.

4) Hasil Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Pelatihan

Pelatihan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Hasil yang dicapai meliputi:

- i. Peningkatan keterampilan, baik teknis (produksi, kualitas produk) maupun manajerial (perencanaan bisnis, pemasaran).



- ii. Pengembangan pengetahuan, khususnya terkait manajemen usaha, keuangan, regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital.
- iii. Pemberdayaan pemilik usaha, melalui dorongan untuk lebih mandiri dan berinisiatif dalam mengembangkan usaha.
- iv. Peningkatan daya saing, dengan pemanfaatan inovasi produk, strategi pemasaran, serta penggunaan marketplace dan media sosial.

Berdasarkan wawancara dan tinjauan lapangan, pelaku UMKM merasakan manfaat nyata dari pelatihan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM, seperti kemampuan mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas, serta memperluas pemasaran. Program ini juga memberi pengetahuan tentang perencanaan usaha, strategi pengembangan, hingga cara menghadapi persaingan bisnis modern.

Selain pelatihan, Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah juga mendukung pengembangan UMKM melalui pendampingan, fasilitasi koperasi, dan penyediaan sarana penunjang bagi UMKM yang membutuhkan. Dengan langkah ini, UMKM lokal didorong agar mampu bersaing dan mandiri, serta berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah.

Pembahasan

1) Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah

Pemberdayaan UMKM sebagaimana diatur dalam UU RI No.20 Tahun 2008 merupakan upaya pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam mendorong usaha kecil agar tumbuh menjadi tangguh dan mandiri. Prinsipnya menekankan pada penumbuhan kemandirian dan kewirausahaan, kebijakan publik yang transparan, pengembangan berbasis potensi daerah, peningkatan daya saing, serta penyelenggaraan pelatihan yang terukur.

Pengembangan UMKM pada dasarnya menghadapi keterbatasan modal, bahan baku, tenaga kerja, maupun fasilitas produksi. Oleh karena itu diperlukan dukungan berbagai pihak melalui pelatihan teknis maupun nonteknis, konsultasi, akses kredit yang lebih luas, serta perlindungan bagi usaha tradisional. Dengan adanya kolaborasi dan kemitraan, UMKM diharapkan mampu bertahan sekaligus memperluas pasar agar dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun global.

Upaya pengembangan dilakukan melalui program pelatihan, kegiatan rutin yang mendorong daya beli masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga lain untuk mengatasi keterbatasan dana. Antusiasme pelaku UMKM cukup tinggi meski tantangan permodalan masih menjadi hambatan utama. Pemberdayaan UMKM pada akhirnya bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar mandiri, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta pemerataan ekonomi. Dinas Koperasi dan UMKM berperan penting dalam menetapkan strategi, mulai dari pendidikan dan pelatihan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, fasilitasi pengembangan usaha, hingga peningkatan kompetensi pelaku UMKM.

2) Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Pelatihan

Pelatihan memiliki peranan penting dalam pengembangan UMKM di Aceh Tengah. Pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak hanya sebatas peningkatan pengetahuan, tetapi juga menyentuh aspek keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam usaha mereka. Peserta merasakan manfaat nyata berupa kemampuan memperbaiki kelemahan usaha, peningkatan kreativitas, serta dorongan untuk mengembangkan usaha agar lebih kompetitif. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan UMKM yang menekankan pada penumbuhan kemandirian dan peningkatan daya saing.



Contohnya dapat dilihat pada pelaku usaha kopi yang menjadi lebih terampil dalam mengolah produk, sehingga kualitas dan nilai jualnya meningkat. Begitu juga pada peternak madu yang memperoleh pengetahuan teknis baru, dukungan peralatan, serta motivasi untuk memperluas usaha. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelatihan mampu memberikan solusi langsung terhadap permasalahan yang dihadapi UMKM, seperti keterbatasan keterampilan, permodalan, dan inovasi produk. Dengan demikian, pelatihan berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas usaha sekaligus membentuk kepercayaan diri pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Dampak pelatihan ini juga terlihat pada kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Ketika pelaku UMKM semakin terampil dan mampu memperluas usaha, maka kebutuhan tenaga kerja pun meningkat. Kondisi ini secara tidak langsung membantu mengurangi angka pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan adanya efek ganda seperti ini, pelatihan tidak hanya menguntungkan individu pelaku usaha, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

Selain itu, penguatan daya saing UMKM melalui pelatihan berimplikasi pada keberlanjutan usaha. Pelaku usaha yang dibekali dengan keterampilan teknis dan manajerial cenderung lebih mampu bertahan dalam menghadapi persaingan, baik di tingkat lokal maupun regional. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, keberhasilan ini menjadi penting karena UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian. Artinya, pelatihan dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah melalui penguatan sektor UMKM.

Dengan melihat berbagai dampak tersebut, pelatihan dapat disimpulkan sebagai strategi efektif dalam pemberdayaan UMKM di Aceh Tengah. Program ini bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan, memperluas kesempatan berusaha, dan memperkuat jejaring antar pelaku usaha. Oleh karena itu, pelatihan sebaiknya terus dikembangkan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak agar hasil yang diperoleh lebih optimal dan dapat menjawab tantangan nyata yang dihadapi UMKM.

3) Hambatan Kegiatan Pelatihan

Meskipun pelatihan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah memberikan dampak positif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses dan infrastruktur, terutama bagi pelaku usaha yang berada di daerah terpencil. Keterbatasan sarana transportasi maupun fasilitas pelatihan membuat sebagian pelaku UMKM sulit mengikuti program secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelatihan belum sepenuhnya merata dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM, sehingga diperlukan strategi untuk memperluas jangkauan program.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya juga menjadi masalah yang cukup dominan. Terbatasnya dana mengakibatkan jumlah pelatihan yang dapat diselenggarakan tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. Hal ini memengaruhi kualitas program, baik dari sisi materi yang diberikan maupun intensitas kegiatan. Kendala lain adalah kualitas tenaga pengajar yang belum merata, karena tidak semua instruktur memiliki pengalaman praktis ataupun keahlian teknis yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Akibatnya, beberapa pelatihan belum mampu memberikan transfer pengetahuan yang maksimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah berupaya menjalankan langkah-langkah strategis. Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti bank, balai latihan kerja, maupun lembaga terkait menjadi salah satu solusi agar kebutuhan dana dan sumber daya dapat terpenuhi. Program pelatihan juga disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelaku UMKM sehingga materi yang diberikan lebih relevan dan tepat sasaran. Selain itu, evaluasi dan pemberian umpan balik secara rutin dilakukan sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelatihan.



Hal ini sejalan dengan keterangan informan yang menegaskan bahwa kendala biaya memang sering kali muncul, namun dapat diatasi melalui upaya mencari sponsor atau berkolaborasi dengan pihak lain. Dengan langkah antisipatif ini, pelatihan tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat yang optimal bagi pelaku UMKM. Artinya, meskipun terdapat hambatan struktural maupun teknis, dengan adanya strategi adaptif dan dukungan berbagai pihak, program pemberdayaan dan pengembangan UMKM tetap mampu berjalan secara berkesinambungan dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah.

4) Hasil Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Pelatihan

Pelatihan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, maupun daya saing. Manfaat yang diperoleh pelaku UMKM cukup beragam, yaitu :

- i. Terjadi peningkatan keterampilan teknis seperti kemampuan produksi dan pengendalian kualitas produk, serta keterampilan manajerial yang mencakup perencanaan bisnis dan strategi pemasaran.
- ii. Pelatihan turut mengembangkan pengetahuan peserta terkait manajemen usaha, keuangan, regulasi, hingga pemanfaatan teknologi digital yang kini menjadi kebutuhan penting dalam bisnis modern.
- iii. Pelatihan memberikan dorongan pemberdayaan bagi pemilik usaha untuk lebih mandiri, berinisiatif, serta mampu mengidentifikasi potensi pengembangan usaha secara berkelanjutan.
- iv. Pelatihan terbukti meningkatkan daya saing UMKM melalui pemanfaatan inovasi produk, strategi pemasaran kreatif, serta penggunaan marketplace dan media sosial sebagai sarana promosi yang lebih luas.

Dampak ini terlihat dari kemampuan pelaku usaha mengembangkan produk baru, memperbaiki kualitas yang sudah ada, serta memperluas jangkauan pasar. Selain pelatihan, Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah juga memberikan dukungan tambahan melalui pendampingan, fasilitasi koperasi, serta penyediaan sarana penunjang. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembinaan berkelanjutan dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, UMKM lokal tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga ekosistem pendukung yang memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih mandiri, berdaya saing, serta berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa;

- a) Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan berbasis pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah yang bertujuan untuk memajukan UMKM lokal yang hakikatnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pelaksana UMKM itu sendiri dengan tujuan besar untuk meningkatkan kreativitas, inovasi dan kreasi serta daya saing yang tinggi dari para UMKM itu sendiri.
- b) Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan rencana kerja dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah dan menyasar pada UMKM yang ingin berkembang dan memajukan perekonomian masyarakat dan daerah tanpa terkecuali dan sesuai dengan tugas-tugas pokok yang sesuai dengan konsep



pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Tengah dan pengembangan dan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah proses penting untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing bisnis kecil di berbagai sektor ekonomi.

- c) Secara keseluruhan, kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang berbasis pelatihan adalah kunci untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong inovasi di berbagai sektor terutama sector UMKM itu sendiri dan produktifitas yang baik, sumber daya manusia yang menguasai di bidangnya melalui pelatihan dan bimbingan teknis pada UMKM lokal.

Saran

Berikut beberapa saran yang bisa peneliti sampaikan dalam mendorong efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM berbasis pelatihan;

- a) Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Tengah dapat menambah beberapa program pelatihan yang lain dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan bisa melihat peluang baru pada sektor UMKM demi memajukan perekonomian lokal yang lebih baik lagi untuk menuju Kabupaten Aceh Tengah yang lebih maju dan produktif.
- b) Pada UMKM agar dapat memanfaatkan momentum yang ada dengan menambah ilmu, wawasan dan pengalaman lebih banyak lagi melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM berbasis pelatihan agar ekonomi masyarakat bisa meningkat dan lapangan pekerjaan menjadi luas.

Referensi

- Al Muchtar, Suwarma. (2015). Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Bank Indonesia. (2011). Five Finger Philosophy: Upaya Memberdayakan UMKM
- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. (2004). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Media Group.
- Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Gunawan, Imam. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Hardani (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu
- Herdiansyah, Haris. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial; Salemba Humanika, Jakarta
- Ibrahim, M. (2016). Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman Samarinda.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Aksara Baru. Jakarta
- Krisnadewara, Sri Susilo, Y., (2007). Strategi Bertahan Industri Kecil Pasca Gempa Bumi di



Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan. Bisnis

Kasmir, Kewirausahaan. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011),

Mardikanto, Soebianto. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung.

Marsuki. Pemikiran Dan Strategi Memberdayakan Sektor ekonomi UMKM Di Indonesia. (Jakarta: Mitra Wacana Media. ,2006)

Ningrum Daniar Pramesti, M. Kendry Widiyanto, dan Tri Yuliyanti. (2020). Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya. Surabaya.

Nurgiansah, T. Heru. (2018). Pengembangan UMKM Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian. Bandung.

Pujiono, (2020) Akselerasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Wakil Presiden. Jakarta

PMK, Kemenko. (No 6 Tahun 2020). Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Bupati Aceh Tengah. (No 83 Tahun 2020). Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Institusi Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun. (2021). Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Ekonomi Dan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan - Koperasi, UMKM - Cipta Kerja.

Panjaitan, Samantha Immanuel. (2019). Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan). Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Purwaningsih, Rindik Rati (2018). Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah. Bali: Cahaya Bintang Cemerlang.

Purba, Pratiwi Bernadetta. 2021. Penelitian Tindakan Kelas. Yayasan Kita Menulis.

Soekanto, Soerjono. (2010). Antara Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.



Sumadi, Marantika Febrianti. (2021) Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) “Hardcraft” Limbah Kayu Jati. Bojonegoro.

Sugiyono (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Syaakir, Sofyan (2017). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Indonesia. Bandung.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Wrihatnolo RR & Riant ND 2007, Manajemen Pemberdayaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Yorisca, Yenny (2020) Langkah Penjaminan Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan. Bandun